

**TESIS**

**KONSTRUKSI HUKUM GADAI EMAS YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN**

**SYARIAH**



**OLEH**

**PRO PATRIA**  
**ALFIANO SURYA PUTRA**

**NIM 12218054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**

**KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2020**

**TESIS**

**KONSTRUKSI HUKUM GADAI EMAS YANG DILAKUKAN OLEH  
PERBANKAN SYARIAH**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :  
ALFIANO SURYA PUTRA  
NIM : 12218054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2020**

LEMBAR PENGESAHAN  
TESIS INI TELAH DISETUJUI  
UNTUK DISEMINARKAN

Pada Tanggal... 19-02-2019

Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Habib Adjile, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama

Dr. Habib Adjile, S.H., M.Hum.

PRO PATRIA

**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis ini telah Direvisi

Pada Tanggal... 09 - 09 - 2010

Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Habib Adije, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Kemotarianan  
Universitas Narotama

Dr. Habib Adije, S.H., M.Hum.

PRO PATRIA

TESIS

PADA TANGGAL : 24 Februari 2020

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. MOH. SALEH, S.H., M.H

Anggota : Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

: Dr. NYNDA FATMAWATI OCTARINA  
S.H., M.H

PRO PATRIA





### SURAT PERNYATAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,



**ALFIANO SURYA PUTRA**

NIM : 12218054



## **ABSTRAK**

### **KONSTRUKSI HUKUM GADAI EMAS YANG DILAKUKAN OLEH PERBANKAN SYARIAH**

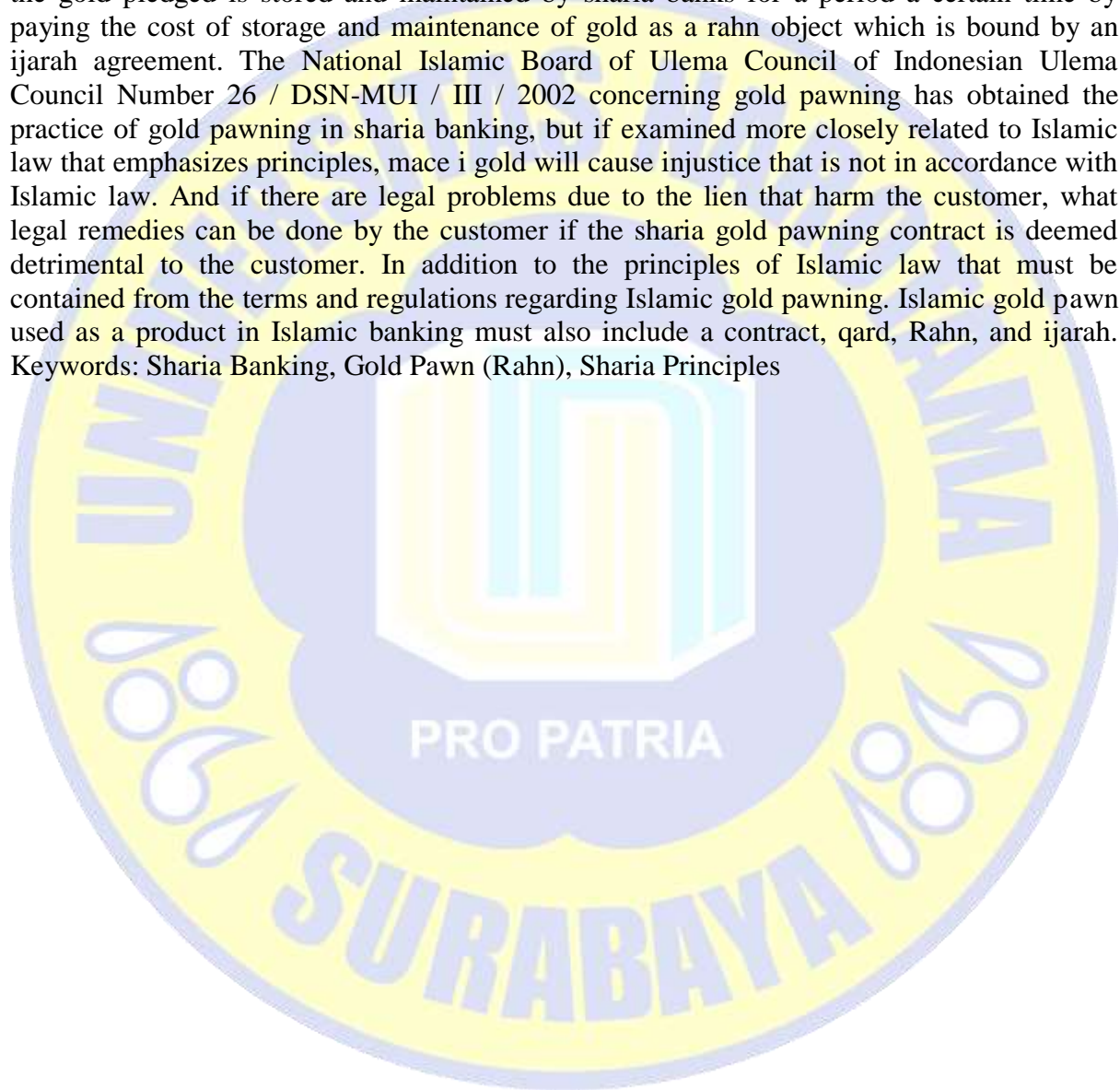
Praktik gadai emas ini menjadi salah satu tren dalam dunia perbankan, tak terkecuali bank syariah juga memiliki produk ini dalam kegiatannya. Akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ini dapat dilakukan antara lain pada produk rahn emas (gadai emas). Qardh beragun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang gadai emas telah memperbolehkan praktik gadai emas di perbankan syariah, tetapi apabila dikaji lebih dalam terkait dengan hukum islam yang menonjolkan prinsip-prinsip, gadai emas akan menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan hukum islam. Dan apabila terdapat permasalahan hukum akibat gadai yang merugikan nasabah tersebut, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila dalam akad gadai emas syariah tersebut dirasa merugikan nasabah. Selain prinsip-prinsip hukum islam yang harus terkandung dari syarat dan aturan mengenai gadai emas syariah. Gadai emas syariah yang dijadikan produk dalam perbankan syariah ini juga harus mencakup akad, qardh, Rahn, dan ijarah.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Gadai Emas (Rahn), Prinsip-Prinsip Syariah

### **Abstrack**

## **CONSTRUCTION OF GOLD LEGAL LAW CONDUCTED BY SHARIA BANKING**

The practice of gold pawning has become one of the trends in the banking world, including Islamic banks as well as having this product in their activities. The qardh contract is conducted in conjunction with other transactions that use mu'awadhah contracts (exchanges and can be commercial) in products aimed at to get this advantage can be done, among others, in the rahn gold product (gold pawning). Gold-backed qardh is one of the products that uses the qardh contract with collateral in the form of gold tied with rahn contract, where the gold pledged is stored and maintained by sharia banks for a period a certain time by paying the cost of storage and maintenance of gold as a rahn object which is bound by an ijarah agreement. The National Islamic Board of Ulema Council of Indonesian Ulema Council Number 26 / DSN-MUI / III / 2002 concerning gold pawning has obtained the practice of gold pawning in sharia banking, but if examined more closely related to Islamic law that emphasizes principles, mace i gold will cause injustice that is not in accordance with Islamic law. And if there are legal problems due to the lien that harm the customer, what legal remedies can be done by the customer if the sharia gold pawning contract is deemed detrimental to the customer. In addition to the principles of Islamic law that must be contained from the terms and regulations regarding Islamic gold pawning. Islamic gold pawn used as a product in Islamic banking must also include a contract, qard, Rahn, and ijarah. Keywords: Sharia Banking, Gold Pawn (Rahn), Sharia Principles





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
RINGKASAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Kajian Pustaka .....	10
a. Hukum Islam.....	10
b. Perjanjian Secara Umum .....	11
c. Perjanjian Secara Hukum Islam .....	12
d. Jaminan Secara Umum .....	13
e. Jaminan Secara Hukum Islam .....	14
f. Gadai Syariah .....	15
1.6 Metode Penelitian .....	15
a. Tipe Penelitian.....	15
b. Pendekatan Masalah .....	16
c. Sumber Bahan Hukum.....	17
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis .....	18
<b>BAB II PRINSIP GADAI EMAS SEBAGAI SALAH SATU PRODUK GADAI EMAS SESUAI DENGAN AKAD QARDH, RAHN, DAN IJARAH .....</b>	<b>20</b>
2.1 Prinsip Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah.....	20
2.2 Gadai Emas Merupakan Produk Perbankan Syariah .....	22
2.3 Akad Pada Gadai Emas Perbankan Syariah.....	30
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRODUK GADAI EMAS .....</b>	<b>44</b>
3.1 Bank Merupakan Lembaga Intermediasi .....	44
3.2 Lembaga Perbankan Syariah.....	48
3.3 Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri.....	51
3.4 Perlindungan Hukum dari Tidak Sehatnya Bank.....	53
3.5 Perlindungan Hukum dari Penyimpangan Praktik Syariah .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran .....	69

<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>.....</b>



## KESIMPULAN

1. Produk gadai emas bank syariah selain harus memenuhi prinsip-prinsip hukum islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, harus pula memperhatikan ketiga akad yang ada dalam perbankan syariah, yaitu akad qardh, rahn dan ijarah. Dalam penggunaan gadai emas ini akad qardh merupakan pinjaman yang diberikan dengan jaminan gadai emas tersebut dan barang yang diserahkan tersebut mengalami perpindahan hak kebendaan tersebut bukan kepemilikannya (akad ijarah) sehingga dalam produk gadai emas ini akad qardh, rahn dan ijarah harus diperhatikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.
2. Kekecewaan pengguna jasa perbankan syariah karena masih ada praktik-praktik perbankan syariah dalam hal ini adalah gadai emas pada perbankan syariah yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan kontinuitas penggunaan jasa bank tersebut tidak dapat dipertahankan lama. Penyimpangan prinsip syariah dapat terjadi dalam perbankan syariah dan kesesuaian dalam praktik perbank syariah harus berdasarkan ketentuan syariah. Untuk melindungi ketaatan bank syariah terhadap prinsip dan kaidah syariah, maka semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam. Dan apabila nasabah merasa dirugikan maka dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi dapat dilakukan di peradilan agama dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, sedangkan non litigasi dapat berupa mediasi antara kedua belah pihak untuk saling mencari solusi dari masalahnya tersebut.

## DAFTAR BACAAN

- Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqh dan Ushuk Fiqh*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Logos, Jakarta, 1997.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Firdaus, Muhammad NH, dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, RENAISSAN Anggota IKAPI, Jakarta, 2005.
- Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003.
- Hasbi, Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Hasan, Djumhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2013
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010.
- Muslihuddin, Muhammad, *Philosophy of the Islamic Law and Orientalis*, Islamic Publication, 1980.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syaria'ah*, cet 1, Safira Insani Press, Yogyakarta, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Putra, Edi Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sahroni, Oni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- Santoso, Ruddy Tri, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- S. P, Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Offset, 2003.
- Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Perss, 2010.
- Syazali, Husni dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Abd, Shomad, *Hukum Perbankan*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2015.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.



Yusuf, Muhammad Musa, *Al-Islam wa Hajah al-insaniyyah Illahi*, Terjemahan Oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul: “*Islam Suatu Kajian Komprehensif*”, Rajawali Pres.



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### *Burgerlijk Wetboek*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3790)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4866)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4867)

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DpbS Tentang Pengawasan Produk Qardh Beragun Emas di Bank Syariah dan Unit Usaha syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagai Perbahan atas PBI NO 9/19/PBI/2007

